
Tata Kelola Perguruan Tinggi dalam Era Teknologi Informasi dan Digitalisasi

Marsus Suti ^{1*}, Muh. Zadly Syahdi ², Didiharyono D. ²

¹ Universitas Negeri Makassar, Indonesia

² Universitas Andi Djemma Palopo, Indonesia

*Correspondent Email: marsus.suti301260@gmail.com

Article History:

Received: 2-8-2020; Received in Revised: 16-8-2020; Accepted: 7-9-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.35914/jemma.v3i2.635>

Abstrak

Dalam menjaga eksistensi perguruan tinggi di era teknologi informasi dan digitalisasi, diperlukan sistem tata kelola perguruan tinggi yang berkualitas agar mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan. Jenis penelitian dalam artikel ini yaitu penelitian kualitatif melalui penelusuran terhadap sejumlah literatur sebagai sumber primer. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem tata kelola perguruan tinggi juga harus memperhatikan prinsip Good University Governance (GUG) dalam mengurangi resiko kesalahan dalam pengelolaannya. Dengan ruang lingkup GUG yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terus menerus dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi. Perwujudan tata kelola perguruan tinggi yang diharapkan harus dilakukan secara bertahap, terencana, dan terprogram dengan kerangka waktu yang jelas mulai dari tata kelola penjaminan mutu, tata kelola aspek fungsional termasuk tata kelola keuangan, dan tata kelola informasi dan digitalisasi. Dengan demikian, belajar dari praktek perguruan tinggi kelas dunia, dapat dilakukan dengan memperoleh kiat sukses agar tata kelola perguruan tinggi menjadi lebih berkualitas serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing.

Kata Kunci: Tata Kelola; Perguruan Tinggi; Teknologi Informasi; Digitalisasi.

Abstract

In maintaining the existence of higher education institutions in the era of information technology and digitalization, a quality higher education system is needed to be able to adapt to the dynamics of change. The type of research in this article is qualitative research through tracing a number of literatures as primary sources. The results of the study show that the higher education governance system must also pay attention to the Good University Governance (GUG) principle in reducing the risk of errors in its management. With the scope of GUG which includes elements of planning, implementation, control, and continuous quality improvement based on monitoring and evaluation. The realization of higher education governance is expected to be carried out gradually, planned, and programmed with a clear time frame starting from quality assurance governance, functional aspect governance including financial governance, and information governance and digitization. Thus, learning from the practice of class university colleges can be done by obtaining successful tips so that higher education governance will be of higher quality and produce qualified graduates who are ready to compete.

Keywords: Governance; College; Information Technology; Digitization.

1. Pendahuluan

Semakin ketatnya persaingan dalam mencari lapangan kerja menuntut lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi untuk mencetak lulusan yang berkualitas dan juga dibutuhkan lulusan yang siap kerja sesuai dengan kompetensi masing-masing (Rajagukguk, 2019). Kualitas lulusan yang siap kerja harus didukung dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan di masing-masing negara (Logli, 2016). Dengan kualitas pendidikan yang bermutu, maka sumber daya manusia negara tersebut siap bersaing dalam pasar tenaga kerja. Begitu pula sebaliknya jika kualitas pendidikan rendah maka sumber daya manusia yang dihasilkan akan sulit bersaing dalam pasar tenaga kerja (Handayani, 2015) (Suti, 2011). Diantara implikasi dari globalisasi persaingan dunia pendidikan yaitu terdapat peluang terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja asing (Sari, 2019), dan adanya regulasi yang membuka kesempatan lembaga pendidikan asing di Indonesia (Abidin, 2016) (Nasucha, 2016). Sehingga, persaingan di pasar kerja akan semakin berat dan sangat mengkhawatirkan, bahkan bisa mereduksi keberadaan perguruan dalam negeri.

Mengantisipasi dinamika perubahan yang begitu cepat dan tantangan yang semakin kompleks, pendidikan tinggi harus mengupayakan segala macam cara dalam meningkatkan daya saing lulusan yang memiliki softskill dan kompetensi sebagai nilai tambah saat diterima di dunia kerja. Perguruan tinggi juga harus terus meningkatkan mutu pendidikan dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik atau *Good University Governance* (GUG) yang baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku (Wahyudin dkk, 2017). Dengan menerapkan GUG maka perguruan tinggi akan mampu bersaing dan akan tetap terjaga eksistensinya.

Perguruan tinggi merupakan bagian dari organisasi dengan entitas dibentuk sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan visi-misi dan tujuan pembentukannya dalam meningkatkan mutu pendidikan (Logli, 2016). Perguruan tinggi yang berkualitas harus secara terus menerus meningkatkan kualitas kinerja dalam pengembangan tridarma perguruan tinggi. Sebagai suatu entitas yang spesifik dalam dunia pendidikan, perguruan tinggi tentunya memiliki tujuan yang spesifik pula sesuai dengan karakteristik lingkungan internal maupun eksternal. Setiap perguruan tinggi memiliki tujuan dan cita-cita masing-masing yang dinyatakan dalam visi dan misi yang disusun bersama *stakeholders* yang ikut berpartisipasi dalam merumuskannya (Sayidah dkk, 2019).

Banyak unsur-unsur strategis yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengembangan perguruan tinggi diantaranya kualitas program akademik, kualitas sumberdaya manusia, kualitas sarana prasarana, dan suasana akademik yang mendukung. Agar unsur-unsur strategis tersebut bisa ditingkatkan, maka perlu didukung dengan metode untuk merealisasikannya yaitu dengan tata kelola yang baik atau berkualitas. Karena itu, untuk menghadapi tingkat persaingan yang semakin tinggi di antara perguruan tinggi di Indonesia, maka setiap perguruan tinggi membutuhkan perubahan yang fundamental untuk bisa bersaing di era kemajuan teknologi informasi, apalagi menargetkan untuk bisa berkiprah dalam kompetisi global.

Tata kelola merupakan suatu metode yang digunakan perguruan tinggi dalam memanfaatkan seluruh potensi secara optimal dan sebagai upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Secara teknisnya, tata kelola dipahami sebagai upaya sistematis dalam

proses pencapaian tujuan yang diharapkan, melalui fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, serta evaluasi. Oleh karena itu, tata kelola melingkupi seluruh proses, unsur-unsur tata kelola, serta memiliki tujuan utama dalam peningkatan kualitas perguruan tinggi yang berkelanjutan dalam mencapai visi dan misi yang diharapkan sebagaimana dalam rencana strategi perguruan tinggi (Kadir, 2013).

Tata kelola bermutu bila dibarengi dengan suasana akademik dan budaya organisasi yang kondusif yang dibentuk dengan menumbuhkan dan menghadirkan kepedulian, rasa memiliki, dan komitmen kebersamaan yang tinggi bagi semua civitas akademika. Isu penerapan prinsip *good governance* pada perguruan tinggi semakin menarik perhatian diberbagai kalangan termasuk peneliti (Sayidah dkk, 2019) (Risanty & Kesuma, 2019). Konsep *good governance* dianggap dapat menjadi obat mujarab ataupun upaya preventif dalam meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi (Wahyuddin dkk, 2017).

Paradigma tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG), pada saat ini menjadi pilihan handal untuk mencapai kesuksesan dalam suatu organisasi. Secara umum tata kelola terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan, komitmen, tanggung jawab, dan unsur lainnya. Tidak hanya itu, tata kelola yang baik mampu mengharuskan adanya perubahan dan inovasi dari sistem yang ada dalam mencapai visi dan misi perguruan tinggi.

Sistem tata kelola yang baik, dapat menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen atau pihak yang terkait. Menurut Syakhroza (2003), GUG didefinisikan sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

GUG merupakan suatu konsep yang muncul karena kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi, memang tidak dapat disamakan dengan pengelolaan sebuah negara atau korporasi. Perbedaannya adalah berkaitan dengan nilai-nilai luhur pendidikan yang harus dijaga dan diimplementasikan dalam proses pendidikan. Sehingga, sangat perlu ditentukan suatu indikator perguruan tinggi telah menerapkan GUG atau tidak, dan bisa diketahui sejauhmana perguruan tinggi tersebut mampu menyikapi dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraannya tanpa mencampakan nilai-nilai luhur bangsa dan amanat yang diembannya dari masyarakat, bangsa dan negara (Rahayu & Wahab, 2013).

Untuk mencapai GUG, diperlukan suatu gerakan perubahan budaya organisasi yang dilakukan secara simultan dengan memperhatikan produktifitas aspek pengembangan tri darma perguruan tinggi dan manajemen mutu perguruan tinggi. Sehingga, kadang-kadang diperlukan reorganisasi dan pemberdayaan di semua lini organisasi, hingga tercapainya kesuksesan organisasi sebagaimana tujuan yang dicita-citakan. Tata kelola sebuah perguruan tinggi bergantung kepada faktor-faktor tersebut yang terintegrasi satu sama lain. Jika salah satu faktor kurang baik maka memiliki dampak yang kurang baik terhadap faktor lainnya dan tentunya menyebabkan tata kelola sebuah perguruan tinggi menjadi kurang baik. Dengan demikian, sistem tata kelola merupakan bagian integral dari tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi, termasuk di dalamnya adalah fakultas/ jurusan/ program studi, dosen, dan karyawan. Oleh karena itu, sistem tata kelola perguruan tinggi harus menyentuh seluruh arah

dan capaian sebagaimana yang telah dideskripsikan dalam Rencana Strategis (Renstra) perguruan tinggi.

2. Metodologi

Jenis penelitian dalam artikel ini yaitu penelitian kualitatif melalui penelusuran terhadap sejumlah literatur sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Metode penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis yang bersifat normatif filosofis berdasarkan sumber-sumber kepustakaan. Sedangkan, obyek penelitian lebih fokus membahas tata kelola perguruan tinggi era informasi dan digitalisasi dengan menganalisis kondisi kelembagaan pendidikan tinggi di Indonesia secara umum.

3. Hasil dan Pembahasan

Perguruan tinggi memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sebuah negara. Semua perguruan tinggi besar di Indonesia juga turut berperan dalam menghadapi dinamika perubahan yang begitu cepat di era informasi dan digitalisasi. Kompleksitas pengelolaan perguruan tinggi harus menjadi perhatian bagi civitas akademik untuk bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tata kelola perguruan tinggi yang sehat dan berkualitas.

Pengelolaan perguruan tinggi harus memperhatikan berbagai aspek dalam mendorong perguruan tinggi yang bermutu, mampu bersaing, dan mencetak lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja. Salah satu aspek yang mempengaruhi pemimpin dalam menghadirkan inovasi bagi perkembangan perguruan tinggi yaitu ide dan gagasan yang mampu merespon dinamika perubahan global. Karena dengan ide dan gagasan maka perguruan tinggi akan mampu eksis dan kokoh dalam menghadapi persaingan. Sistem tata kelola perguruan tinggi juga harus memperhatikan prinsip *good governance* dalam mengurangi resiko kesalahan dalam pengelolaannya. Tata kelola perguruan tinggi sangat diperlukan karena telah menjadi fungsi penting dalam peningkatan mutu akademik (Nasition dkk, 2020).

1. Prinsip Utama GUG

Prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan bermutu. Prinsip tersebut sangat erat kaitannya dengan prinsip *good governance* dengan ciri-ciri yaitu sebagai berikut (Rahayu & Wahab, 2013) (Kadir, 2013).

- a. **Transparansi**, yaitu tentang suatu kebijakan, regulasi, program, kegiatan dan anggaran perguruan tinggi diketahui dan dipahami oleh sivitas akademika sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam memajukan perguruan tinggi.
- b. **Akuntabilitas**, yaitu tentang tingkat pertanggungjawaban pimpinan perguruan tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- c. **Pengorganisasian**, yaitu tentang sejauh mana pimpinan perguruan tinggi mampu menerapkan berbagai prinsip pengorganisasian, seperti menetapkan tata hubungan kerja, rincian tugas pokok, fungsi/wewenang serta melakukan *directing* (pengarahan) dengan prinsip persamaan derajat (*equity*) dan inklusifitas (*inclusiveness*).
- d. **Partisipatif**, yaitu tentang proses pengambilan keputusan strategis perguruan tinggi melibatkan *stakeholders* eksternal, sehingga *stakeholders* dapat mendukung penyelenggaraan perguruan tinggi secara aktif.

- e. **Responsif**, yaitu tentang sejauh mana kebijakan, regulasi/ aturan, program, termasuk dalam pengalokasian anggaran mendapat dukungan dan tanggapan positif dari sivitas akademika.
- f. **Efisiensi dan Efektivitas**, yaitu tentang seberapa besar upaya pimpinan perguruan tinggi untuk membuat sivitas akademika faham, dan dapat memberi komitmen terhadap kebijakan/ regulasi dan program yang telah ditetapkan.
- g. **Leadership yang tunduk pada aturan yang berlaku (rule of law)**. Prinsip ini yaitu tentang kepemimpinan perguruan tinggi yang mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menginspirasi civitas akademika agar bekerja secara produktif dalam upaya pencapaian visi dan misi perguruan tinggi. Termasuk, jika terjadi pelanggaran setelah dilakukan upaya preventif maka pemimpin akan menegakkan aturan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Prinsip ini sangat diperlukan dalam pengelolaan perguruan tinggi menjadi GUG. Prinsip utama tersebut tidak dijalankan secara terpisah, melainkan harus dipenuhi secara integratif dan dilaksanakan secara simultan. Sehingga, visi dan misi perguruan tinggi bisa tercapai sesuai dengan program yang telah disusun dalam rencana strategi perguruan tinggi dan tujuan dasar pendidikan tinggi. Salah satu keistimewaan institusi perguruan tinggi yaitu terletak pada fungsi dasarnya dalam hal pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang lingkup GUG

Secara umum, ruang lingkup GUG meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terus menerus berdasarkan monitoring dan evaluasi.

- a. **Perencanaan**, merupakan suatu penetapan kebijakan, penyusunan program, dan anggaran dalam rencana strategis perguruan tinggi, serta merumuskan cara dalam melaksanakan programnya. Perencanaan melingkupi penetapan kerangka waktu (*time frame*) yang diharapkan dalam upaya pencapaian program pencapaian jangka pendek maupun pencapaian jangka panjang dengan melibatkan seluruh sumberdaya dalam melaksanakan kebijakan.
- b. **Pelaksanaan**, merupakan proses merealisasikan program yang direncanakan. Tahapan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh sumberdaya secara optimal dalam melaksanakan semua perencanaan sebagaimana yang telah disusun dan dideskripsikan dalam rencana strategis perguruan tinggi. Dalam unsur pelaksanaan, seluruh sumberdaya juga dilibatkan dalam pelaksanaan seluruh program.
- c. **Pengendalian**. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan monitoring sangat penting, sebagai upaya mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan melakukan upaya perbaikan secara langsung agar kebijakan dapat sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.
- d. **Peningkatan kualitas**, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan perguruan tinggi, setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Peningkatan kualitas dilakukan secara terus menerus.

Mekanisme pemenuhan dan pelaksanaan tata kelola perguruan tinggi dilakukan pada tahap implementasi kebijakan dan pelaksanaan program perguruan tinggi. Di dalam setiap organisasi, tahap pelaksanaan merupakan tahapan yang paling penting dan kritis dalam proses

pencapaian tujuan. Apabila sistem tata kelola tidak diimplementasikan, maka dapat menyebabkan kebijakan, regulasi, dan program tidak dapat diwujudkan. Kalaupun tercapai akan melalui berbagai komplikasi dan biaya yang tinggi, sehingga perguruan tinggi menjadi tidak efisien. Oleh karenanya, dengan rasa optimisme apapun kendala yang dihadapi dalam pemenuhan standar tata kelola yang baik, dapat dituntaskan dengan baik melalui strategi dan gagasan untuk memperbaiki kendala-kendala tersebut.

3. Tata Kelola Penjaminan Mutu

Tata kelola penjaminan mutu perguruan tinggi dimulai dengan memperkuat kelembagaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), penyusunan dan penerapan standar kebijakan mutu (*quality policy*), audit mutu, hingga peningkatan mutu yang berkelanjutan. Hal ini didukung penjelasan Rahayu & Wahab (2013), bahwa tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme penilaian internal organisasi ataupun mekanisme penilaian eksternal organisasi. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPM-PT) dilaksanakan dengan dasar penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal, dan proses perijinan penyelenggaraan program (Kadir, 2013). Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut.

a. Penjaminan Mutu Internal

Penjaminan mutu internal merupakan suatu proses perbaikan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi sesuatu dengan rencana strategis perguruan tinggi. Parameter dan metoda mengukur hasil ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai visi dan misinya, serta mengacu pada standar akreditasi nasional. Dengan menjalankan penjaminan mutu internal, maka institusi pendidikan tinggi sebaiknya melakukan evaluasi internal disebut evaluasi diri secara berkala. Evaluasi diri dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

b. Penjaminan Mutu Eksternal

Penjaminan mutu eksternal merupakan upaya perbaikan mutu perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga lain yang diakui oleh BAN-PT. Parameter dan metode mengukur hasil ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan sesuai dengan 9 (sembilan) standar yang ditetapkan di antaranya (1) visi, misi, tujuan, dan strategi; (2) tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; (3) mahasiswa; (4) sumber daya manusia; (5) keuangan, sarana, dan prasarana; (6) pendidikan; (7) penelitian; (8) pengabdian kepada masyarakat; dan (9) luaran dan capaian tridharma (BAN-PT, 2019). Akreditasi oleh lembaga akreditasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi eksternal untuk menilai kelayakan program institusi pendidikan tinggi. Selain menilai kelayakan program, akreditasi juga dimaksudkan untuk pemberian saran peningkatan dalam mengupayakan peningkatan kualitas berkelanjutan.

c. Perijinan Penyelenggaraan Program

Perijinan penyelenggaraan program diberikan oleh Ditjen-Dikti untuk satuan pendidikan yang memenuhi syarat penyelenggaraan program pendidikan. Tata cara dan parameter yang digunakan ditetapkan oleh Ditjen-Dikti sesuai ketentuan yang ada. Perijinan selain dimaksudkan sebagai evaluasi eksternal juga untuk menilai kelayakan kepatuhan penyelenggaraan program. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi secara

keseluruhan dimaksudkan untuk melakukan peningkatan kualitas institusi pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

4. Tata Kelola Aspek Fungsional

Tata kelola aspek fungsional tentunya berdasarkan pada standar capaian pengelolaan perguruan tinggi yang baik sebagaimana perbaikan standar mutu perguruan tinggi yang telah dirumuskan oleh BAN-PT. Tata kelola aspek fungsional pada umumnya meliputi manajemen program akademik (tri-dharma); manajemen sumber daya manusia (dosen dan karyawan); manajemen keuangan; serta perbaikan sarana dan prasarana.

a. Manajemen program akademik

Manajemen program akademik harus dimulai dari manajemen Program Studi, yang meliputi (a) aspek kurikulum termasuk pengembangan dan review kurikulum yang sesuai dengan kurikulum nasional. (b) Aspek siklus proses pendidikan yang dimulai dari proses rekrutmen mahasiswa, perencanaan studi, evaluasi kemajuan, kelulusan, yudisium, hingga wisuda. (c) Proses Belajar Mengajar (PBM) diawali dengan penyusunan kalender akademik, penawaran mata kuliah, penjadwalan kuliah, monitoring dan evaluasi perkuliahan, termasuk kegiatan praktikum mahasiswa di laboratorium/studio/lapangan; serta pembimbingan untuk tugas akhir mahasiswa.

Tidak hanya itu, pembinaan kemahasiswaan juga harus menjadi perhatian diantara melakukan konseling terhadap permasalahan mahasiswa, pengembangan diri mahasiswa dengan mengadakan kegiatan atau lomba dalam peningkatan bakat dan minat, memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang bersyarat dan *tracer study* bagi para alumni. Selanjutnya, berkaitan dengan manajemen program penelitian dan pengabdian masyarakat harus dimulai dengan pengembangan kapasitas institusi/ lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat; manajemen inovasi dan Hak Kekayaan intelektual (HAKI); dan kerjasama dengan berbagai stakeholders dengan prinsip *Triple Helix model*, merit akademik, transparansi, keadilan (*fairness, equity*), dan akuntabilitas.

b. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, sedangkan, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan serta lingkungan di sekitarnya, adapun prestasi kerja dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya (Widodo, 2015). Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dipandang sebagai peranan yang cukup penting di organisasi termasuk dalam pengelolaan perguruan tinggi. Manajemen SDM merupakan suatu proses yang mencakup evaluasi terhadap kebutuhan SDM, mendapatkan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan itu, dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang penting tersebut dengan cara memberikan insentif dan penugasan yang tepat, agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi di mana SDM itu berada (Primayana, 2016).

Peranan manajemen SDM yang dikemukakan oleh Hasibuan (2005) bisa digunakan dalam perbaikan tata kelola SDM perguruan tinggi. Peranan tersebut meliputi (1). Penetapan jumlah, kualitas, dan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi berdasarkan; (2). Menetapkan penerimaan, rekrutmen, dan penempatan dosen dan staf berdasarkan kebutuhan sesuai dengan *the right man in the right job*; (3). Penetapan program kesejahteraan bagi civitas akademika, pengembangan, promosi, dan pemberhentian bagi

civitas akademika yang melanggar sesuai dengan aturan yang berlaku; (4). Melakukan *forecasting* (prediksi) penawaran dan permintaan sumber daya manusia di masa mendatang; (5). Melakukan perkiraan keadaan perekonomian dan perkembangan perguruan tinggi serta kondisi para lulusan (alumni) yang siap kerja; (6). Melakukan monitoring dengan cermat perubahan undang-undang atau kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan perguruan tinggi; (7). Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan kinerja karyawan (dosen dan staf); (8). Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan; (9). Mengatur mutasi karyawan baik vertical maupun horizontal; dan (10). Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangon bagi karyawan.

Manajemen SDM perguruan tinggi sangat penting untuk menjadi perhatian dalam pengelolaan GUG, diantara tujuannya yaitu (1). Memberi pertimbangan dalam kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki civitas akademika yang selalu siap mengatasi dinamika perubahan sesuai dengan kualitas masing-masing; (2). Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya; (3). Membantu dalam pengembangan arah dan strategi organisasi khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM; (4). Memberi dukungan yang akan membantu pimpinan dalam mencapai tujuan bersama; (5). Mampu memecahkan berbagai krisis dan situasi sulit yang terjadi untuk meyakinkan bahwa civitas akademika akan mampu menemukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut; (6). Adanya media komunikasi antara civitas akademika dan manajemen organisasi; (7). Memperbaiki dan mengembangkan standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM (Sutrisno, 2009).

c. Manajemen Keuangan

Perguruan tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan efisiensi sehingga penggunaannya dapat dimanfaatkan secara optimal. Perguruan Tinggi juga memiliki kewajiban untuk menghasilkan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mencakup neraca, laporan operasional, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Manajemen Keuangan harus dimulai dari perencanaan dan penganggaran, sistem akuntansi, pelaporan dan audit, kemudian penggalangan & pengelolaan dana yang berkaitan dengan penyediaan atau pengadaan unit usaha (komersial, akademik, pendukung), serta proses penetapan dan perubahan anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi.

Indikator kinerja manajemen keuangan perguruan tinggi dapat diketahui dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Institusi Publik) atau pada masing-masing website perguruan tinggi, hasil audit dari auditor independen, auditor pemerintah, tingkat daya serap anggaran, dan lain sebagainya. Indikator tersebut menunjukkan mutu pengelolaan keuangan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel. Pada prinsipnya hasil audit dapat memberikan makna bahwa proses pengelolaan dana mulai dari penerimaan sampai dengan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik berdasarkan aturan yang berlaku. Adapun tingkat daya serap anggaran menunjukkan bahwa efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan (Wahyudin dkk, 2017).

Banyak pilihan yang cukup luas terhadap alat-alat dan teknik-teknik manajemen keuangan yang tersedia untuk perguruan tinggi, dimana tidak hanya sistem atau model-model yang dikembangkan khusus untuk perguruan tinggi, akan tetapi praktik-praktik yang dilakukan oleh organisasi nirlaba bisa juga digunakan. Perguruan tinggi seyogyanya tidak menganggap bahwa praktik-praktik yang exist itu sebagai kendala dan hambatan, tetapi sebagai model yang dapat diikuti dan dikembangkan tergantung kondisi di masing-masing perguruan tinggi.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan semua fasilitas yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar agar capaian pembelajaran berjalan dengan efektif, lancar, dan teratur. Sedangkan, prasarana merupakan fasilitas yang secara tidak langsung menunjang kegiatan belajar mengajar seperti halaman, taman atau kebun pendidikan, jalan yang digunakan, tata tertib dan gambar yang memiliki nilai estetika, suasana yang asri, dan sebagainya. Dengan demikian, sarana dan prasarana merupakan bagian yang sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar.

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan pendidikan. Agar fasilitas tersebut terpenuhi maka diperlukan manajemen dalam keberadaan sarana dan prasarana yang dimaknai sebagai kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan/material bagi terselenggaranya proses pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, manajemen pengadaan, penyimpanan barang/ peralatan, pemeliharaan, dan penghapusan pemeliharaan.

5. Tata Kelola Informasi dan Digitalisasi

Tata kelola informasi (data) dan digitalisasi termasuk pengetahuan tentang management system yang berbasis pada pengembangan informasi dan teknologi. Penerapan teknologi informasi secara langsung akan mempengaruhi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan pendidikan yang lebih spesifik. Keberadaan teknologi informasi memiliki dampak penting terhadap tata kelola perguruan tinggi dan dalam pengembangan tri darma perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang sehat harus memiliki perencanaan strategis dalam menyeimbangkan teknologi informasi dan digitalisasi, mulai dari tata kelola yang baik, sistem aplikasi pendukung management area fungsional, hingga tata kelola sistem perpustakaan yang berbasis digitalisasi.

Kemajuan teknologi, informasi dan digitalisasi tersebut menuntut perguruan tinggi untuk terus beradaptasi terhadap kemajuan tersebut. Perguruan tinggi yang sehat adalah perguruan tinggi yang mampu merespon terhadap kemajuan teknologi tersebut. Kemajuan teknologi sangat memungkinkan untuk menjadi suatu alternatif dalam memecahkan berbagai masalah-masalah dalam dunia pendidikan. Sebab dengan kemajuan teknologi pendidikan mampu memberikan informasi yang lebih luas, lebih cepat, serta mudah diakses oleh para praktisi lainnya.

Pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan sangat mungkin terjadi perubahan yang cukup besar dalam proses belajar mengajar dengan mengakses berbagai sumber-sumber pembelajaran yang telah terdigitalisasi (Didiharyono &

Qur'ani, 2019). Diantara kemungkinan perubahan tersebut yaitu penerapan pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari tata kelola perguruan tinggi. Selama pandemik Covid-19 penyelenggaraan pendidikan wajib hukumnya memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai upaya menghindari penyebaran virus Covid-19 (Karim, 2020).

Revolusi teknologi informasi dan digitalisasi telah menjanjikan struktur interaksi manusia yang lebih cepat dan lebih efisien dengan kualitas yang sama. Revolusi informasi global merupakan keberhasilan manusia modern dalam menyatukan kemampuan komputasi matematis dengan media elektronik dan media cetak menjadi terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini adalah suatu kombinasi revolusi di bidang komputer personal, transmisi data, lebar pita (*bandwidth*), teknologi penyimpanan data (*data storage*), dan penyampaian data (*data access*), integrasi multimedia dan jaringan komputer. Konvergensi dari revolusi teknologi tersebut telah menyatukan berbagai media, yaitu suara (*voice, audio*), video, citra (*image*), grafik, dan teks (Sallis, 2014). Hal ini terjadi sebagai akibat dari revolusi teknologi informasi yang telah merubah kehidupan manusia dengan cara kerja yang lebih kreatif, efektif, dan praktis.

Sebagaimana dua sisi kehidupan manusia selalu pada dua keadaan yaitu baik dan buruk, demikian halnya dengan teknologi informasi. Teknologi ini seharusnya dimanfaatkan dengan benar dan diperhitungkan secara matang, sebab apabila keliru dalam penggunaannya maka akibatnya secara fatal bagi kehidupan manusia (Harun, 2019). Revolusi teknologi informasi dalam dunia pendidikan dapat mempengaruhi bentuk pilihan teknologi yang digunakan. Revolusi ini juga telah mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia dari segala bidang mulai dari bidang kesehatan, entertainment, pemerintahan, perdagangan, pola produksi, hingga mempengaruhi pola relasi antar masyarakat. Hal ini telah menjadi tantangan bagi semua bangsa, masyarakat dan individu masa kini dan masa yang akan datang. Siap tidak siap lembaga pendidikan harus menyambutnya dengan baik dan harus beradaptasi dengan perubahan tersebut (Laila, 2012).

Perguruan tinggi harus menyiapkan seluruh unsur dalam sistem pendidikan agar tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh perkembangan tersebut. Melalui penerapan dan pemilihan yang tepat teknologi informasi, maka perbaikan mutu pendidikan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Perbaikan tersebut harus berlangsung terus-menerus dan konsisten agar dapat mendorong perguruan tinggi dalam memperbaiki proses pendidikan. Adanya revolusi informasi dapat menjadi tantangan bagi perguruan tinggi dan akan menjadi peluang yang baik bila perguruan tinggi dalam menyikapi dengan penuh keterbukaan dalam menghadapi dinamika perubahan tersebut.

4. Kesimpulan

Sistem tata kelola perguruan tinggi dalam dalam era informasi dan digitalisasi akan berhasil, jika awali dengan penyusunan visi, misi, dan rencana strategis bersama para stakeholders. Sistem tata kelola perguruan tinggi juga harus memperhatikan prinsip GUG dalam mengurangi resiko kesalahan dalam pengelolaannya. Dengan memperhatikan ruang lingkup GUG yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terus menerus dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi. Perwujudan

tata kelola yang diharapkan harus dilakukan secara bertahap, terencana, dan terprogram dengan kerangka waktu yang jelas mulai dari tata kelola penjaminan mutu, tata kelola aspek fungsional termasuk tata kelola keuangan, dan tata kelola informasi dan digitalisasi. Dengan demikian, belajar dari praktek perguruan tinggi kelas dunia dapat dilakukan dengan memperoleh kiat sukses agar tata kelola perguruan tinggi menjadi lebih berkualitas serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing.

5. Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2016). Peluang Dan Tantangan MEA: Kerjasama Pendidikan Indonesia di Kawasan Asean. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 1(01), 28-39.
- BAN-PT. (2019). Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 3.0 (IAPT 3.0). Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Jakarta
- Didiharyono, D., & Qur'ani, B. (2019). Increasing Community Knowledge through the Literacy Movement. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 17-24.
- Handayani, T. (2015). Relevansi lulusan perguruan tinggi di Indonesia dengan kebutuhan tenaga kerja di era global. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(1), 53-64.
- Harun, H. (2019). Kesiapan Pendidikan Tinggi Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Kelembagaan. *Prosiding*, 4(1), 187-194
- Hasibuan, M. S.P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kadir, A. (2013). Tata Kelola Perguruan Tinggi di Era ITC. *Shautut Tarbiyah*, 19(1), 66-83.
- Karim, B. A. (2020). Pendidikan Perguruan Tinggi Era 4.0 Dalam Pandemi Covid-19 (Refleksi Sosiologis). *Education and Learning Journal*, 1(2), 102-112.
- Laila, R. (2012). Peran Pustakawan Perguruan Tinggi Dalam Era Informasi Dan Digitalisasi. *Jurnal Ta'lim*, 2(3), 105-133.
- Logli, C. (2016). Higher Education in Indonesia: Contemporary challenges in Governance, Access, and Quality. In *The Palgrave handbook of Asia Pacific higher education* (pp. 561-581). Palgrave Macmillan, New York.
- Nasucha, J. A. (2016). Pendidikan Islam Dan Tantangan Globalisasi. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 205-218.
- Nasution, V. I. A., Prasajo, E., Jannah, L. M., & Yumitro, G. (2020). Governance of Autonomous Higher Education Institution toward World-Class University: A Case Study at the Universitas Indonesia. *Governance*, 7(10), 2020.
- Primayana, K. H. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(2), 7-15.
- Rahayu, S., & Wahab, A. A. (2013). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good University Governance Terhadap Citra Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi BHMN. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 17(1).
- Rajagukguk, B. (2009). Paradigma Baru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tabularasa*, 6(1), 77-86.

- Risanty, R., & Kesuma, S. A. (2019). Good University Governance: Experience from Indonesian University. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(4), 515-524.
- Sallis, E. (2014). *Total Quality Management in Education*. London: Kogam Page.
- Sari, N. T. (2019). *Kebijakan Yang Mempermudah Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*. (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Sayidah, N., Ady, S. U., Suprijati, J., Winedar, M., Mulyaningtyas, A., & Assagaf, A. (2019). Quality and University Governance in Indonesia. *International Journal of Higher Education*, 8(4), 10-17.
- Sulistiyani. A. T. (Ed.), (2004). *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Suti, M. (2011). Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan. *Jurnal Medtek*, 3(2), 1-6.
- Syakhroza, A. (2003). Best Practices Corporate Governance dalam konteks kondisi lokal perbankan Indonesia. *Manajemen Usahawan*, XXXII (06), 13-20
- Wahyudin, A., Nurkhin, A., & Kiswanto, K. (2017). Hubungan Good University Governance Terhadap Kinerja Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 21(1), 60-69.
- Widodo, S.E. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.